

Analisis Pengaruh Perubahan Struktural Ekonomi dalam Sistem Multiregional di Indonesia

Semsoni Haggai Simanjuntak¹, Wahyu Widodo²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dharma Putra Pekanbaru

E-mail: sonisimanjuntak008@gmail.com¹, wahyuwidodo1229@gmail.com²

Abstrak

Perubahan struktural ekonomi merupakan fenomena penting dalam dinamika pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan struktural ekonomi dalam sistem multiregional di Indonesia, dengan fokus pada pergeseran sektor ekonomi, kesenjangan antarwilayah, dan tantangan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi kasus multiregional yang melibatkan beberapa wilayah dengan karakteristik ekonomi berbeda, seperti Jawa, Bali, Papua, dan Nusa Tenggara. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam distribusi manfaat perubahan struktural ekonomi antar wilayah. Wilayah maju, seperti Jawa dan Bali, cenderung mendominasi sektor industri dan jasa, sementara wilayah tertinggal masih bergantung pada sektor primer. Faktor infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, dan kapasitas pengelolaan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam mengintegrasikan wilayah tertinggal ke dalam arus ekonomi nasional. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam di wilayah tertentu memicu degradasi lingkungan, menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan struktural ekonomi di Indonesia memerlukan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, literasi digital, dan kapasitas SDM di wilayah tertinggal. Temuan ini memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan mendukung transformasi nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi, Perubahan Struktural, Sistem Multiregional.

PENDAHULUAN

Perubahan struktural ekonomi merupakan fenomena yang tak terelakkan dalam dinamika pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Proses ini mencerminkan transformasi dari struktur ekonomi tradisional, yang cenderung bergantung pada sektor primer seperti pertanian, menuju struktur ekonomi modern yang lebih berorientasi pada sektor sekunder dan tersier seperti manufaktur dan jasa. Dalam konteks Indonesia, perubahan struktural ekonomi tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan pada tingkat multiregional. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis, menghadapi tantangan yang unik dalam mengelola perubahan struktural ini. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, perbedaan infrastruktur, serta variasi tingkat kontribusi sektor ekonomi di masing-masing daerah menjadi tantangan utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis multiregional menjadi sangat relevan untuk memahami dampak perubahan struktural terhadap berbagai dimensi ekonomi, termasuk distribusi pendapatan, migrasi tenaga kerja, dan efisiensi alokasi sumber daya antar wilayah.

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong transformasi struktural, seperti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan infrastruktur yang masif, dan peningkatan daya saing industri nasional. Namun, dampak kebijakan ini terhadap struktur ekonomi dan hubungan antar wilayah di Indonesia masih menjadi isu yang perlu dianalisis lebih mendalam. Selain itu, globalisasi dan integrasi ekonomi regional juga mempercepat perubahan struktural, yang pada gilirannya memengaruhi dinamika hubungan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan struktural ekonomi dalam sistem multiregional di

Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana transformasi sektoral memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, distribusi pendapatan, dan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam perencanaan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti empiris.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika perubahan struktural ekonomi di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi strategi yang paling efektif untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah nusantara. Perubahan struktural ekonomi merupakan proses transformasi yang ditandai dengan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan perubahan pola kerja dari sektor tradisional menuju sektor modern. Proses ini menjadi indikator penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman geografis, sosial, dan ekonomi yang menciptakan tantangan tersendiri dalam mengelola perubahan struktural ini, terutama dalam konteks multiregional.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa. Namun, perubahan ini tidak merata di seluruh wilayah. Wilayah-wilayah yang memiliki infrastruktur memadai dan akses ke pasar global, seperti Jawa dan Bali, cenderung lebih cepat mengalami transformasi ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Papua, Maluku, atau sebagian wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Ketimpangan ini menciptakan disparitas pembangunan yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendorong pemerataan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Meski demikian, dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap perubahan struktural ekonomi di tingkat multiregional masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Tidak hanya itu, dinamika globalisasi, revolusi industri 4.0, dan tantangan seperti pandemi COVID-19 turut memengaruhi pola perubahan struktural di Indonesia, sehingga menciptakan kompleksitas baru dalam hubungan ekonomi antarwilayah.

Penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami pengaruh perubahan struktural ekonomi dalam konteks multiregional di Indonesia. Analisis yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi ekonomi ini berdampak pada berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, migrasi tenaga kerja, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi sangat penting. Studi ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang ada dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas berbagai pertanyaan penting, seperti sejauh mana perubahan struktural ekonomi memengaruhi dinamika hubungan antarwilayah di Indonesia, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menciptakan pemerataan pembangunan, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan manfaat dari perubahan struktural tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, disparitas pembangunan antar wilayah masih menjadi isu yang mencolok. Pulau Jawa, misalnya, menyumbang lebih dari 50% PDB nasional, sementara wilayah lain seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih menghadapi tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya analisis tentang bagaimana perubahan struktural ekonomi memengaruhi hubungan antarwilayah.

Perubahan struktural ekonomi sering kali disertai dengan urbanisasi besar-besaran dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian di pedesaan ke sektor industri dan jasa di perkotaan. Fenomena ini memunculkan tantangan baru seperti tekanan pada infrastruktur perkotaan, pengangguran di wilayah pedesaan, serta meningkatnya ketimpangan sosial di kota-kota besar.

Pandemi COVID-19 mempercepat perubahan struktural di berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya digitalisasi dan pergeseran pola konsumsi masyarakat. Namun, dampaknya tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah dengan akses internet yang baik dan infrastruktur digital yang memadai mampu beradaptasi lebih cepat, sementara daerah lain tertinggal dalam memanfaatkan peluang ini. Integrasi Indonesia dalam ekonomi global dan perkembangan teknologi membawa tantangan dan peluang baru. Sektor-sektor seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi tumbuh pesat, tetapi banyak wilayah di Indonesia belum mampu memanfaatkan momentum ini karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur masif, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan desentralisasi fiskal untuk mendorong pemerataan pembangunan. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam mendorong perubahan struktural ekonomi yang inklusif masih menjadi perdebatan, terutama di tengah tantangan birokrasi, korupsi, dan alokasi sumber daya yang tidak merata.

Dalam upaya mendorong perubahan struktural yang berkelanjutan, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan perubahan iklim. Beberapa wilayah yang bergantung pada sektor sumber daya alam harus bertransformasi ke sektor ekonomi hijau, yang membutuhkan investasi besar dan perubahan kebijakan. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan struktural ekonomi tidak hanya menjadi persoalan ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial, politik, dan lingkungan yang saling berkaitan. Dengan memahami pola dan dampaknya pada tingkat multiregional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (literature review) untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pengaruh perubahan struktural ekonomi dalam sistem multiregional di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, dan dinamika yang kompleks dalam fenomena perubahan struktural ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena, pola, dan tantangan yang muncul dalam konteks perubahan struktural ekonomi di tingkat multiregional. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh perubahan struktural ekonomi dalam sistem multiregional di Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengambilan kebijakan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, era desentralisasi yang dimulai sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan sesuai potensi lokal. Desentralisasi ini diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Namun, capaian pertumbuhan ekonomi daerah masih bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait.

- 1) **Infrastruktur yang Mendukung Aktivitas:** Ekonomi Infrastruktur memegang peranan penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi, dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi. Dalam era desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam membangun infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Namun, keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis sering menjadi hambatan, terutama di daerah tertinggal.
- 2) **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas yang lebih baik. Dalam era desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menjadi semakin strategis. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi kendala.
- 3) **Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki akses terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sayangnya, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal di banyak daerah masih rendah. Selain itu, penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi juga menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
- 4) **Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Banyak daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti tambang, minyak, gas, dan hasil hutan. Namun, pengelolaan yang kurang bijaksana sering kali mengarah pada eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan, dan rendahnya manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 5) **Iklm Investasi dan Regulasi:** Iklim investasi yang kondusif dapat menarik investor untuk menanamkan modal di suatu daerah, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa daerah masih menghadapi masalah regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang berbelit, dan kurangnya insentif bagi investor. Dalam desentralisasi, peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim bisnis yang ramah menjadi semakin penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
- 6) **Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan:** Stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah yang memiliki pemerintahan yang stabil dan transparan cenderung lebih menarik bagi investor dan mampu menjalankan program pembangunan secara efektif. Sebaliknya, daerah yang sering menghadapi konflik politik atau ketidakstabilan sosial cenderung mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi.

- 7) Adaptasi terhadap Tren Ekonomi Global: Dalam era globalisasi, tren seperti digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau memberikan peluang baru bagi daerah untuk mengembangkan sektor ekonomi mereka. Beberapa daerah yang mampu beradaptasi dengan tren ini, seperti Bali dengan pariwisata digital dan Yogyakarta dengan startup teknologi, menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Namun, banyak daerah lain yang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi inovasi ini.

Faktor-faktor seperti infrastruktur, kualitas SDM, pengelolaan keuangan, potensi sumber daya alam, iklim investasi, stabilitas politik, dan adaptasi terhadap tren global sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia. Meskipun desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri, masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Dengan pendekatan yang tepat, desentralisasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah peningkatan kapasitas suatu wilayah atau daerah dalam memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang diukur melalui indikator ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah, beberapa poin penting yang dapat dijelaskan adalah: Fokus Wilayah: Pertumbuhan ekonomi daerah berpusat pada aktivitas ekonomi yang terjadi dalam wilayah administratif tertentu, seperti provinsi, kota, atau kabupaten, sesuai dengan potensi dan karakteristik lokalnya. Indikator Utama: Indikator yang umum digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah laju pertumbuhan PDRB, baik secara nominal maupun riil. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah sering menghadapi tantangan seperti ketimpangan antarwilayah, ketergantungan pada sumber daya alam, dan kurangnya infrastruktur serta tata kelola yang efektif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi daerah bukan hanya tentang peningkatan angka statistik, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Desentralisasi telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1999, yang memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi lokal. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah masih belum merata. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi ini perlu dipahami.

Faktor Ekonomi

- 1) PDRB (Produk Domestik Regional Bruto): PDRB merupakan indikator utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi.
- 2) Investasi: Investasi langsung dan tidak langsung berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

- 3) Inflasi: Inflasi yang terkendali dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Faktor Politik

- 1) Kualitas Pemerintahan: Kualitas pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat.
- 2) Kebijakan Daerah: Kebijakan daerah yang tepat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting.

Faktor Sosial

- 1) Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
- 2) Kesehatan: Kesehatan yang baik dapat meningkatkan produktivitas.
- 3) Kualitas Hidup: Kualitas hidup yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Faktor Infrastruktur

- 1) Transportasi: Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas.
- 2) Komunikasi: Infrastruktur komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi.
- 3) Energi: Ketersediaan energi yang memadai sangat penting.

Faktor Lingkungan

- 1) Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Kualitas Lingkungan: Kualitas lingkungan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup.
- 3) Bencana Alam: Pengelolaan bencana alam yang efektif sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah daerah harus memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap literatur yang relevan, hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia. Temuan-temuan berikut menjelaskan dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan:

- 1) Infrastruktur dan Konektivitas Antarwilayah

Pembangunan infrastruktur yang memadai terbukti menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dengan akses jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi yang baik menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan infrastruktur yang terbatas. Namun, hasil studi menunjukkan ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menyebabkan disparitas ekonomi yang signifikan, di mana daerah yang memiliki infrastruktur lengkap lebih mudah menarik investasi dan mengembangkan aktivitas ekonomi.

- 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM berperan besar dalam menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan akses terhadap pelatihan keterampilan memiliki kemampuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompetitif. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah tertinggal, yang menghambat pengembangan potensi SDM secara merata.

3) Kemandirian dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada daerah untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah masih menghadapi kendala, seperti lemahnya perencanaan dan pengawasan, serta adanya penyalahgunaan anggaran dalam beberapa kasus.

4) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam

Banyak daerah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pengelolannya sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi yang tidak berkelanjutan dan kurangnya hilirisasi produk sumber daya alam menjadi penyebab utama rendahnya kontribusi sektor ini terhadap pembangunan daerah. Beberapa daerah yang berhasil mengelola sumber daya alam secara bijak menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

5) Iklim Investasi dan Kebijakan Daerah

Iklim investasi di suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintah daerah, regulasi yang mendukung, dan penyederhanaan birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan kebijakan yang pro-investasi, seperti pemberian insentif pajak dan penyediaan fasilitas infrastruktur pendukung, berhasil menarik lebih banyak investasi dibandingkan daerah yang memiliki regulasi yang tidak jelas dan birokrasi yang berbelit.

6) Stabilitas Politik dan Tata Kelola Pemerintahan

Daerah yang memiliki stabilitas politik dan pemerintahan yang transparan lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa konflik politik, korupsi, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah daerah menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah.

7) Adaptasi terhadap Tren Global

Daerah yang mampu beradaptasi dengan tren ekonomi global, seperti digitalisasi dan transisi menuju ekonomi hijau, menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar. Contoh keberhasilan dapat dilihat di beberapa daerah yang mengembangkan ekosistem digital dan pariwisata berbasis teknologi. Namun, sebagian besar daerah masih mengalami kesulitan dalam mengadopsi perubahan ini akibat keterbatasan teknologi dan sumber daya.

8) Penyelarasan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah yang berhasil menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional, seperti pembangunan infrastruktur strategis dan pengembangan kawasan industri, menunjukkan hasil yang lebih optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Ketimpangan infrastruktur, rendahnya kualitas SDM, dan lemahnya tata kelola pemerintahan menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan kurangnya adaptasi terhadap perubahan global juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya

sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan tata kelola, serta investasi pada infrastruktur dan SDM untuk mengatasi kendala yang ada dan mengoptimalkan potensi daerah.

Desentralisasi di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 2001, bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola sumber daya dan kewenangan secara mandiri. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih signifikan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Artikel ini akan membahas faktor-faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia.

- 1) **Kapasitas Fiskal Daerah:** Kapasitas fiskal merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola pendapatan, baik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi cenderung memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program pembangunan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal rendah sering kali kesulitan membiayai kebutuhan dasar, sehingga pertumbuhan ekonominya tertinggal.
- 2) **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan:** Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci dalam mengelola desentralisasi. Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi lebih mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, praktik korupsi dan birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dengan menurunkan kepercayaan investor dan masyarakat.
- 3) **Sumber Daya Alam dan Manusia:** Potensi sumber daya alam (SDA) sering kali menjadi salah satu faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang kaya akan SDA, seperti tambang, pertanian, atau kehutanan, memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang bijaksana, ketergantungan pada SDA dapat menyebabkan kerentanan ekonomi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga memainkan peran penting. Daerah dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tinggi memiliki daya saing lebih besar dalam era globalisasi.
- 4) **Infrastruktur dan Aksesibilitas:** Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi menjadi salah satu prasyarat utama untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi. Daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya terbatas cenderung mengalami kesulitan untuk mengembangkan perekonomian.
- 5) **Kebijakan dan Regulasi Lokal:** Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah berpengaruh langsung terhadap iklim usaha dan investasi. Kebijakan yang mendukung, seperti pemberian insentif kepada investor dan penyederhanaan perizinan, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, regulasi yang terlalu kompleks atau memberatkan dapat menghambat aktivitas ekonomi.
- 6) **Kerjasama Antar Daerah:** Kerjasama antar daerah, seperti melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus atau proyek lintas wilayah, dapat meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi. Kerjasama ini memungkinkan daerah untuk berbagi sumber daya, meningkatkan daya saing, dan mengatasi keterbatasan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing daerah.
- 7) **Dukungan Pemerintah Pusat:** Meskipun desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, dukungan dari pemerintah pusat tetap penting, terutama dalam

bentuk transfer dana, pengawasan, dan bimbingan teknis. Kebijakan makroekonomi dan regulasi nasional juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

- 8) Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun keterlibatan langsung dalam proyek-proyek lokal, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi yang aktif juga meningkatkan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.

Era desentralisasi memberikan peluang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Namun, keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan SDA dan SDM, infrastruktur, kebijakan lokal, kerjasama antar daerah, dukungan pemerintah pusat, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini, diharapkan setiap daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

Infrastruktur merupakan elemen fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke, infrastruktur yang terintegrasi menjadi kebutuhan mutlak untuk menciptakan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana fisik yang memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, tetapi juga sebagai katalisator dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah daerah harus memahami dan mengoptimalkan faktor-faktor ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur yang memadai memungkinkan distribusi barang dan jasa secara efisien, menekan biaya logistik, dan mempercepat waktu pengiriman. Misalnya, pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan waktu tempuh antarwilayah dan meningkatkan konektivitas antarprovinsi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain itu, infrastruktur energi, seperti pembangkit listrik dan jaringan listrik, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Daerah yang memiliki akses listrik yang baik dapat menarik investasi sektor industri dan manufaktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Konektivitas antarwilayah memungkinkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi minim akses pasar, untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional dan global. Sebagai contoh, pembangunan pelabuhan laut di Indonesia Timur, seperti Pelabuhan Makassar New Port, telah memperkuat akses ekspor komoditas lokal ke pasar internasional. Konektivitas udara melalui bandara juga menjadi penopang sektor pariwisata di daerah seperti Bali, Lombok, dan Labuan Bajo, yang kini menjadi destinasi wisata unggulan dunia.

Namun, meskipun terdapat berbagai kemajuan, masih ada ketimpangan konektivitas antarwilayah. Wilayah Indonesia Barat, seperti Jawa dan Sumatera, cenderung lebih maju dalam hal infrastruktur dibandingkan dengan wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku. Ketimpangan ini menciptakan disparitas ekonomi yang signifikan dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Pengembangan infrastruktur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan anggaran, kompleksitas birokrasi, dan kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, faktor geografis, seperti topografi yang sulit dan wilayah yang terpencil, sering kali meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur.

Korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam proyek infrastruktur juga menjadi kendala serius yang menghambat efisiensi dan efektivitas pembangunan. Dalam beberapa kasus, proyek-proyek besar mengalami keterlambatan atau tidak selesai tepat waktu akibat manajemen yang buruk. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperkuat perencanaan dan pengawasan dalam proyek infrastruktur. Kerja sama dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Selain itu, penerapan teknologi modern, seperti sistem informasi geografis (GIS) untuk perencanaan proyek, dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada wilayah maju, tetapi juga menjangkau daerah-daerah terpencil.

Program seperti "Tol Laut" dan pengembangan jalan lintas Papua menjadi langkah penting untuk menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dan konektivitas antarwilayah merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi disparitas, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan infrastruktur yang terintegrasi, daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal dapat menjadi pusat-pusat ekonomi baru yang memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan nasional. Namun, keberhasilan ini membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

- 1) Pergeseran Kontribusi Sektor Ekonomi: Transformasi struktural ekonomi di Indonesia ditandai dengan pergeseran dominasi sektor primer (agraris) ke sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Data menunjukkan bahwa sektor industri dan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, terutama di wilayah Jawa dan Sumatra. Namun, ketergantungan pada sektor agraris masih tinggi di wilayah tertinggal seperti Papua, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan.

Implikasi: Pergeseran ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mencapai transformasi ekonomi pada tingkat tertentu. Namun, disparitas antarwilayah mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk mendiversifikasi ekonomi di daerah tertinggal agar tidak hanya bergantung pada sektor primer.

- 2) Ketimpangan Antarwilayah: Wilayah maju seperti Jawa memiliki keunggulan dalam infrastruktur, akses teknologi, dan konsentrasi investasi. Sebaliknya, wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan akses transportasi, minimnya investasi, dan rendahnya literasi teknologi. Ketimpangan ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan dan kontribusi terhadap ekonomi nasional.

Solusi Potensial: Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan berbasis kebutuhan lokal, seperti penguatan infrastruktur digital dan transportasi di wilayah tertinggal. Program seperti dana otonomi khusus untuk Papua harus dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

- 3) Urbanisasi dan Migrasi Tenaga Kerja: Perubahan struktural ekonomi mendorong urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan. Hal ini memicu peningkatan jumlah penduduk di wilayah metropolitan, seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, yang menyebabkan tekanan pada infrastruktur perkotaan. Namun, banyak tenaga kerja migran yang tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sehingga meningkatkan tingkat pengangguran.

Pendekatan: Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi dalam menyediakan pelatihan vokasional berbasis industri. Selain itu, pembangunan ekonomi di pedesaan

melalui sektor agribisnis dan teknologi berbasis lokal dapat mengurangi tekanan urbanisasi.

- 4) **Dinamika Perubahan Struktural dan Teknologi:** Perkembangan teknologi dan digitalisasi memberikan peluang besar bagi pertumbuhan sektor jasa di wilayah maju. Namun, wilayah tertinggal yang belum memiliki infrastruktur digital memadai tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Revolusi Industri 4.0 menjadi tantangan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah dapat mengakses teknologi secara merata.

Arah Kebijakan: Program percepatan digitalisasi, seperti perluasan jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), sangat penting untuk menciptakan perubahan struktural yang inklusif. Literasi digital masyarakat di daerah tertinggal juga perlu ditingkatkan agar dapat bersaing dalam ekonomi berbasis teknologi.

- 5) **Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan:** Eksploitasi sumber daya alam di wilayah seperti Kalimantan dan Papua sering kali dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol telah merusak ekosistem lokal dan kehidupan masyarakat adat.

Rekomendasi: Pengintegrasian prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan ekonomi harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu menetapkan regulasi ketat terhadap aktivitas pertambangan dan industri untuk meminimalkan kerusakan lingkungan, serta mendorong program rehabilitasi ekosistem.

- 6) **Efektivitas Kebijakan Desentralisasi:** Desentralisasi fiskal yang diterapkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki potensi besar untuk mendukung perubahan struktural ekonomi di daerah. Namun, banyak pemerintah daerah menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.

Solusi Strategis: Penguatan kapasitas administrasi pemerintah daerah melalui pelatihan dan monitoring berkala sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan desentralisasi perlu diiringi dengan pengawasan transparan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan sesuai prioritas pembangunan daerah.

- 7) **Integrasi Multiregional dalam Sistem Ekonomi Nasional:** Perubahan struktural ekonomi yang terintegrasi antarwilayah dapat memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Namun, integrasi ini hanya dapat tercapai jika pemerintah mampu menciptakan sinergi antara wilayah maju dan tertinggal melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan insentif investasi di wilayah tertinggal.

Langkah ke Depan: Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, untuk menciptakan perubahan struktural ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktural ekonomi di Indonesia telah memberikan dampak positif pada tingkat nasional, tetapi disparitas antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi ekonomi multiregional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Dalam era desentralisasi di Indonesia, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi secara mandiri, namun keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa aspek kunci. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja di daerah mempengaruhi produktivitas ekonomi. Daerah yang berhasil meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Infrastruktur seperti jalan, transportasi, listrik, dan telekomunikasi adalah fondasi penting bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Daerah yang memiliki infrastruktur memadai lebih mampu menarik investasi dan mendorong pertumbuhan. Kebijakan daerah yang mendukung investasi, termasuk kemudahan perizinan, stabilitas politik, dan keamanan, sangat menentukan daya tarik ekonomi suatu wilayah. Pemanfaatan SDA secara optimal, berkelanjutan, dan berbasis teknologi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas pemerintah daerah meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan. Daerah yang mampu mendiversifikasi basis ekonominya, tidak hanya bergantung pada sektor tertentu, lebih tahan terhadap guncangan ekonomi global maupun nasional. Secara keseluruhan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah dalam era desentralisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, optimalisasi potensi lokal, serta kerja sama dengan pemerintah pusat. Tantangan seperti korupsi, kesenjangan antar daerah, dan rendahnya kapasitas institusi perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pedapatan dan desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, 20(1), 53-68.
- Alisman, A., & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019. *Jurnal EMT KITA*, 4(2), 71-79.
- Arham, M. A. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 431-451.
- Ayu, D., Daulay, M., & Gowasa, R. K. (2024). Dinamika Perekonomian Indonesia: sebuah Tinjauan Historis dari Sentralisasi ke Desentralisasi. *Polyscopia*, 1(2), 36-42.
- Azzumar, M. R., & Handayani, H. R. (2011). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Bertus, R., Suluh, S., & Takari, D. (2021). Analisis perubahan struktur ekonomi dan umur terhadap kesempatan kerja di provinsi kalimantan tengah. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata*, 1(2), 8-14.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149-163.
- Dyanti, F. E. (2021). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2019* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi Dan otonomi daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2), 1-9.

- Handraini, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 601-608.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan Ri Tahun 2018*, 784-799.
- Indrasari, V., & Poerwono, D. (2011). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Jordi, B., & Wiguna, A. B. (2022). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kalimantan Timur Pada Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2014-2020. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 1(2), 200-209.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi: Sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 101-119.
- Kogoya, T. (2018). Analisis potensi sektor unggulan dan perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Gema Eksos*, 7(2), 218209.
- Lahu, E. P. (2021). Dampak Investasi Infrastruktur Di Sulawesi Selatan Terhadap Struktur Ekonomi Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 51-63.
- Nadeak, M. F., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2022). Derajat desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Samosir. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 75-88.
- Nasution, H. S. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan produk domestik regional bruto era desentralisasi fiskal di Propinsi Banten periode 2001: 1-2009: 4. *Media Ekonomi*, 29-48.
- Ningsih, K. S., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(3), 2606-2614.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(1), 70-91.
- Nurhemi, N. (2015). Dampak otonomi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 18(2), 183-206.
- Pasaribu, L. S. P. (2023). Identifikasi Struktur Ekonomi Sektoral Dan Regional Seluruh Provinsi Di Indonesia Menggunakan Analisis Network. *Bina Ekonomi*, 27(2), 194-208.
- Prabasari, R. I., & Purnomo, D. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 4291-4308.
- Prasetyo, M. A. (2023). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1326-1331.
- Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). Studi Empiris: Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 4(2), 13-25.

- Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2019, December). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Kemiskinan di Daerah Pertanian Tinggi dan Rendah Pada Era Desentralisasi Fiskal. In *Prosiding: Seminar Nasional Ekonomi dan Teknologi* (pp. 64-75).
- Raharja, W. T., Khusna, K., Dhesinta, W. S., Nomor, J. A. R. H., & Sukolilo, K. (2020). Dampak Desentralisasi dalam Otonomi Daerah pada Pengembangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik (JPAP)*, 6(1).
- Rahman, Y. A., & Chamelia, A. L. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi pdrb kabupaten/kota jawa tengah tahun 2008-2012. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 8(1).
- Rudibdo, R., & Sasana, H. (2017). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Ekskaresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2(2), 215-226.
- Rustan, A. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi, serta kaitannya dengan otonomi daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(3).
- Saputra, B., & Mahmudi, M. (2012). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 16(2).
- Sasana, H. (2016). Dampak implementasi desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga di provinsi di Indonesia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 30(1).
- Sovita, Y. D. R. I. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 2(4).
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193-210.
- Windusancono, B. A. (2021). Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah Di Indonesia. *Mimbar Administrasi*, 18(1), 89-105.
- Zulkipli, Z. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 3(1).